

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM SENGKETA  
LAUT TIONGKOK SELATAN  
(ERA PRESIDEN SOEHARTO SAMPAI PRESIDEN JOKOWI)**

Oleh : Anna Yulia Hartati

Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email : [annayuliahartati@gmail.com](mailto:annayuliahartati@gmail.com)

**Abstract**

*The objective of this study was to determine why Indonesia take a role in the form of foreign policy in the South China Sea dispute and to know the shapes of Indonesian foreign policy related to the dispute. Political constellation in the Asia Pacific region at the same colored grim situation heats up. South China Sea that becomes the fulcrum of geopolitics in the Asia Pacific region into an international level talks for causing triggering a conflict between a number of major countries in Asia and some member states of ASEAN. The core issue is around claims disputed border area (territorial zone). By the end of 2014, the South China Sea territorial disputes this has impacted quite dramatically towards polarization force the warring countries. Indonesia as one of the countries in Southeast Asia was not directly involved in the conflicts over territory in the South China Sea. However, Southeast Asia is a strategic land for Indonesia which has a number of potential regionality within ASEAN membership. In short, if the regional stability in the ASEAN body threatened by dispute in the South China Sea, then it will have an impact on the credibility and noncompliance with ASEAN security posture that would be influential for Indonesia. This study uses research instrument documentation, using techniques reseach library (library research), namely by taking the data from books, articles, and internet. Design in the design of this study was descriptive, whereas Comparative analysis using Constant (Grounded Theory Research).*

**Keywords: Foreign Policy Affairs, Dispute LTS, National Interest Indonesia, stability of the region, ASEAN**

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, konstelasi politik di kawasan Asia Pasifik cenderung bernuansa muram sekaligus memanas. Laut Tiongkok Selatan yang menjadi titik tumpu geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi suatu pembicaraan tingkat internasional karena menyebabkan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara-anggota ASEAN. Inti masalah yang diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*). Hingga akhir tahun lalu, sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai.<sup>1</sup> Persinggungan klaim kedaulatan dan yurisdiksi wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan melibatkan enam negara yaitu: Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sifat pola interaksi antar setiap negara tersebut menjadi lebih konflikktual, dikarenakan kepentingan masing-masing negara terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Menurut Biro Hidrografis Internasional, Laut Tiongkok Selatan disebut sebagai perairan yang memanjang dari arah barat daya ke arah timur laut, berbatasan di sebelah selatan dengan 3° lintang selatan antara Sumatra dan Kalimantan dan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan hingga ke arah pantai Fukien, Tiongkok. Luas perairan meliputi sekitar 4.000.000 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Perairan ini terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan *banks*. Salah satu gugus pulau di perairan ini yang memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah adalah pulau *Spartlay* dan *Paracel*.<sup>3</sup>

Seiring dengan mencuatnya kabar mengenai kekayaan sumber daya alam yang berada di Laut Tiongkok Selatan, sejumlah aksi agresif dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan ini untuk melegitimasi setiap wilayah yang diklaim atas kepemilikannya.<sup>4</sup> Klaim tersebut merujuk hingga kepada faktor historis,

---

<sup>1</sup> "Sengketa Wilayah Laut Tiongkok Selatan" diakses dari <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/aayear-end-story> pada tanggal 18 September 2014, Pukul 4.53 WIB

<sup>2</sup> Hasjim Djalal, "Potential Conflict in the South Tiongkok Sea: In search of Cooperation," Indonesian Quarterly XVIII, no.2 (Second Quarter, 1990): 364-5

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *The Spratly Islands Dispute in the South Tiongkok Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic*

perhitungan ekonomi dan pertimbangan geostrategis dari negara-negara yang terlibat.<sup>5</sup>

Perseteruan atas klaim perbatasan (*territorial zone*) di Laut Tiongkok Selatan hingga kini belum juga terselesaikan. Persinggungan klaim kedaulatan dan yurisdiksi wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan melibatkan enam negara yaitu: Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sifat pola interaksi antar setiap negara tersebut menjadi lebih konfliktual, dikarenakan kepentingan masing-masing negara terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Perairan ini terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan banks. Salah satu gugus pulau di perairan ini yang memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah adalah pulau Spartlay dan Paracel. Setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat Spratly dinilai strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya dan berdampak pada luas jangkauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang akan dimiliki. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan ini disinyalir mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Perairan ini terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan banks. Salah satu gugus pulau di perairan ini yang memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah adalah pulau Spartlay dan Paracel. Setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat Spratly dinilai strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya dan berdampak pada luas jangkauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang akan dimiliki. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan ini disinyalir mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar.

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara memang tidak

---

*Accommodation*” diakses dari [www.southTiongkoksea.org](http://www.southTiongkoksea.org) pada tanggal 18 September 2014. Pukul 6.00 WIB

<sup>5</sup> *Ibid.*

terlibat secara langsung di dalam konflik perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Akan tetapi, Asia Tenggara merupakan lahan strategis bagi Indonesia yang memiliki sejumlah potensi regionalitas di dalam keanggotaan ASEAN. Singkat kata, apabila stabilitas regional di dalam tubuh ASEAN terancam karena sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan, maka hal tersebut akan berdampak pada ketidaksiuaian terhadap kredibilitas dan postur keamanan ASEAN yang akan berpengaruh bagi Indonesia.<sup>6</sup>

Merunut panjang waktu yang akan dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan, maka diperlukan suatu upaya yang mampu untuk tetap menjaga stabilitas kawasan, keamanan hingga kondusifitas hubungan hingga akhirnya konflik ini dapat terselesaikan. Upaya yang Indonesia lakukan adalah melalui jalur diplomasi, yang kemudian lebih dikenal sebagai langkah awal *diplomasi preventif* Indonesia.<sup>7</sup> Salah satu cara dalam diplomasi preventif Indonesia adalah dengan membangun serta meningkatkan rasa saling percaya (*confidence building measures*) antara pihak-pihak yang bertikai.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Mengapa Indonesia mengambil bagian kebijakan luar negeri dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan?
- b. Apa bentuk kebijakan luar negeri Indonesia terkait sengketa tersebut?

## **C. Kerangka Berpikir**

### **C. 1. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep paling umum dan paling mendasar yang digunakan dalam pembahasan politik luar negeri suatu negara. Konsep ini sering digunakan juga untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik Internasional. Kepentingan nasional adalah sebagai dasar dalam menjelaskan

---

<sup>6</sup> Yudha Kurniawan, "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan, *Paper* ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung, 2011.

<sup>7</sup> Eduardus mengutip dari "*The South Tiongkok Sea Dispute: Prospects for Preventive Diplomacy*". Diunduh dari [http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South\\_Tiongkok\\_Sea1.html](http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South_Tiongkok_Sea1.html). Diakses pada tanggal 19 September 2014. Pukul 13.39 WIB

<sup>8</sup> *Ibid.*

bagaimana karakteristik negara tersebut dalam menjalin hubungan internasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.<sup>9</sup>

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Jack C Plano dan Roy Olton kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>11</sup>

Dari konsep kepentingan nasional diatas, maka kepentingan nasional Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah pengakuan internasional, kepentingan *prestige* (citra), Kepentingan Ekonomi dan menciptakan rasa kesepahaman (*mutual understanding*)<sup>12</sup>diantara negara-negara yang berkonflik.

## **C. 2. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

### **Kebijakan Luar Negeri**

Studi mengenai politik internasional seringkali didominasi oleh studi mengenai kebijakan luar negeri. Studi tersebut memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan dan unsur kekuatan negara. Kebijakan (politik) luar negeri adalah tindakan konkrit yang digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari tujuan negara. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa

---

<sup>9</sup> Anak Agung Banyu Perwita. dan Yanyan M.Yani.. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: Rosdakarya. 2005), Hal.35

<sup>10</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES,1990), hal 163

<sup>11</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda, *Third Edition*, (England:Clio Press Ltd,1982),hal.7

<sup>12</sup> Anna Yulia Hartati, *Introduksi Diplomasi Kebudayaan*, Suara Merdeka, 8 Oktober 2011

lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Secara terperinci tujuan kebijakan luar negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan serta dikendalikan untuk mengubah kebijakan atau mempertahankan kebijakan ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.<sup>13</sup>

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.<sup>14</sup> Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>15</sup> Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara bangsa.<sup>16</sup>

Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik
2. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah

---

<sup>13</sup> Perwita, A.A Banyu dan Yani, Yamyam Muhammad, “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal.49-51

<sup>14</sup> James N Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*, The Free Press, New York, hal. 27

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.32

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.15

berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.<sup>17</sup>

Lebih jauh, Holsti menjelaskan lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktifitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagi dalam kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri memiliki tiga komponen yang mencerminkan kepentingan yang lebih luas<sup>19</sup>, yaitu: (1) Sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*), suatu pedoman untuk menghadapi kondisi eksternal yang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi prinsip dan tendensi umum yang terdiri dari sikap, persepsi dan nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan kondisi strategis penentu posisi negara dalam politik internasional, (2) Sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plans for action*), berupa rencana dan komitmen konkrit termasuk tujuan dan alat yang spesifik untuk mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. (3) Sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*), berupa langkah nyata berdasarkan orientasi umum, dengan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternal. Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Jadi kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan orientasi, sekumpulan komitmen dan rencana aksi dan sebagai suatu bentuk perilaku. Setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi diluar dengan ketiga bentuk kebijakan luar negeri tersebut.<sup>20</sup>

Terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan, Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik itu sendiri tetapi ada kepentingan yang tidak bisa diabaikan. Indonesia tidak

---

<sup>17</sup> Jack C Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Abardin, Bandung, 1999, hal. 6

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bercovitch, Jacob and Jackson, Richard. (2001). "Negotiation or Mediation?: An Exploration of Factors Affecting the Choice of Conflict Management in International Conflict", *Negotiation Journal*; Vol. 17, No. 1.

punya kepentingan langsung karena memang tidak pernah bergesekan secara fisik dengan Tiongkok seperti ditunjukkan Filipina untuk memperebutkan Scarborough Shoal dan Spratly Islands atau Vietnam untuk dalam sengketa Spratly Islands dan Paracel Islands. Kepulauan Indonesia pun tidak ada yang masuk dalam klaim tumpang tindih seperti dialami Malaysia dan Brunei Darussalam di Spratly Islands. Bahkan, Kemenlu Tiongkok sudah menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta. Namun, kita tidak bisa menutup fakta ada irisan di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak, Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik. Cadangan ini tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Apakah Tiongkok tidak tertarik dengan kue yang demikian menggiurkan? Apakah klaim LTS sebatas romantisme historis, tidak bermuatan politis dan ekonomis? Hal ini menjadi menarik ketika ditarik ke dalam ranah politik luar negeri Indonesia yang notabene bebas dan aktif.

#### D. METODOLOGI PENELITIAN

##### a. *Metode dan Cara Penelitian*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup> Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup>

Dalam metode ini peneliti berusaha untuk menganalisa alasan Indonesia

---

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1989, hal 23

<sup>22</sup> Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.63

mengambil bagian dalam upaya penyelesaian sengketa LTS dan bentuk kebijakan Luar Negeri Indonesia. Dengan data – data yang tersedia peneliti menganalisa tentang keadaan yang terjadi.

*b. Teknik Pengambilan Data*

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian dokumen . Penelitian dokumen dimaksudkan unuk mendeskripsikan berbabagi realita yang diteliti. Data diperoleh melalui sumber data sekunder. Data-data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter, yakni melalui majalah, surat kabar, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang. Juga dari beberapa perpustakaan yang terdapat data yang relevan dengan penelitian ini.

*c. Teknik Analisa Data*

Analisa data dilakukan melalui interpretasi dari dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif – kualitatif. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan. Untuk mengetahui validitas data informasi yang diperoleh diadakan *Cross cheking* data tersebut menunjukkan adanya *reliable* data yang akan dianalisa.

## **E. PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Konflik Klaim Wilayah di Kawasan laut Tiongkok Selatan**

Pada dasarnya, kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan *no man's island*.<sup>23</sup> Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa kawasan ini tidak dimiliki secara strategis oleh pihak manapun, melainkan hanya digunakan sebagai jalur perdagangan internasional.<sup>24</sup> Menurut salah satu berita

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Rowan, J.P. *The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South Tiongkok Sea Dispute*. Asian Survey, Vol XLV, No. 3, May/June 2005.

yang dilansir melalui *Tiongkok Outpost* disebutkan bahwa, setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat salah satu kepulauan yang berada di kawasan Laut Tiongkok Selatan, *Spratly* dinilai strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya dan berdampak pada luas jangkauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang akan dimiliki. Kedua, wilayah Kepulauan *Spratly* merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan ini disinyalir mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar.<sup>25</sup>

**Tabel 1**  
**Minyak dan Gas di Negara-Negara Laut China Selatan**

Negara	Cadangan Minyak/Milyar Barel	Cadangan Gas/Trilyun kubik	Produksi minyak/ribuan barel/hari	Produksi Gas/m kubik/hari
Brunai	1,1	13,8	203,5	366
China	1,6	80	3,864,4	1,960
Malaysia	4,0	83	750,8	2,208
Philipina	0,14	3,5	25,2	88
Taiwan	0,01	22	1,0	28
Thailand	0,5	1,7	186,9	858
Vietnam	0,6	6,8	344,6	162
Jumlah	21, 17	184,2	5.186,4	4.680

Sumber: Energi Information Administration, 2008,  
Country Anaysis Brief, South China Sea, hal.6

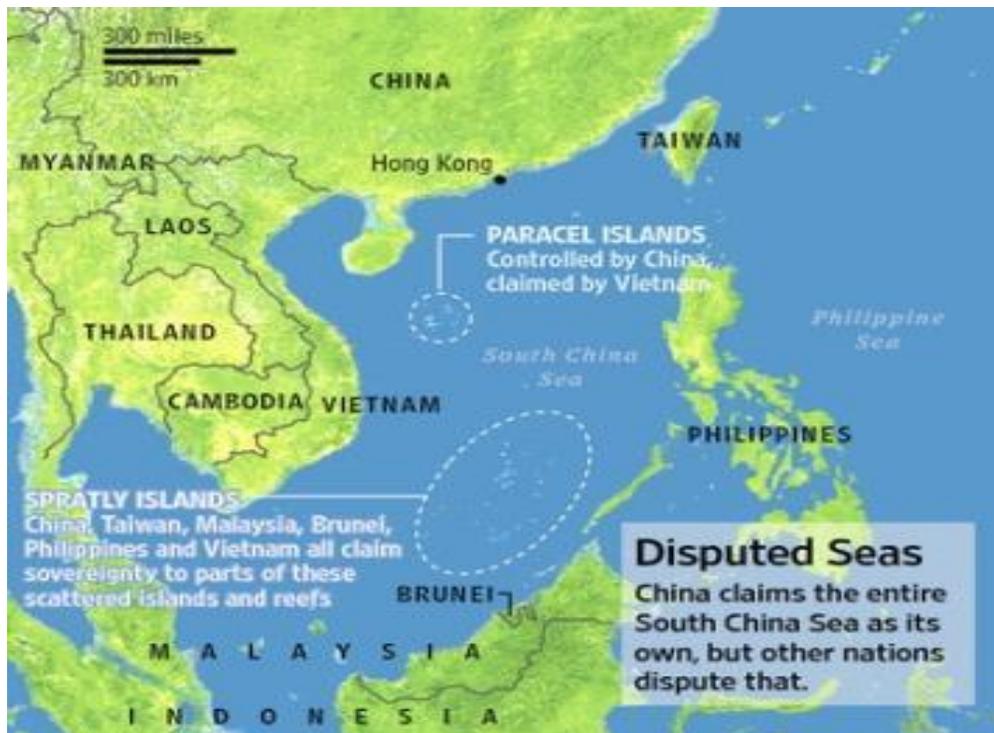
Menurut Kaplan, estimasi kalkulatif jumlah cadangan minyak dan gas alam di

<sup>25</sup> “Sengketa Kepulauan Spratly: Tantangan Bagi Indonesia” (Tiongkok Oupost,2011). Diunduh dari <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik-internasional/472-sengketa-kepulauan-spratly-tantangan-bagi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011>. Diakses pada tanggal 19 September 2014. Pukul 20.56 WIB

kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah sekitar 7 miliar barel dan 900 triliun kubik kaki gas alam.<sup>26</sup> Sehingga, faktor utama atas klaim wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan ini semakin terlihat dan gencar diperdebatkan. Dari enam negara yang terlibat sengketa atas Kepulauan *Spratly*, tiga negara mengklaim seluruh wilayah, yaitu: Tiongkok, Vietnam dan Taiwan. Sementara tiga negara lainnya hanya mengklaim sebagian wilayah, yaitu: Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.<sup>27</sup>

Berikut adalah Peta Kawasan Laut Tiongkok Selatan:

Sumber: [www.jpj.or.id](http://www.jpj.or.id)



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat kedekatan geografis antara Indonesia dengan hampir seluruh negara yang memiliki konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dengan kedekatan wilayah tersebut, maka lingkungan keamanan dan strategis Indonesia dapat terpengaruh jika terjadi suatu konflik terbuka.

Selain itu, konflik yang melibatkan elemen militer juga terjadi pada tahun

<sup>26</sup> Robert D. Kaplan, "The South Tiongkok Sea is The future of Conflict", dalam *Foreign Policy* September/Oktober 2011, hal 78-85.

<sup>27</sup> *Op.Cit*

1995, dimana Tiongkok melakukan okupasi terhadap pulau *Mischief Reef* di sekitar pulau *Spratly* yang telah diklaim sebagai bagian dari wilayah Filipina.<sup>28</sup>

**Tabel 2**  
**Klaim Negara Atas Wilayah Laut China Selatan**

Negara	Laut China Selatan	Kepulauan Spratly	Kepulauan Paracel	Teluk Thailand
Brunai	UNCLOS	Tanpa Klaim Formal	Tidak	Tidak mungkin
Kamboja	Tidak mungkin	Tidak mungkin	Tidak mungkin	UNCLOS
China	Semua	Semua	Semua	Tidak mungkin
Indonesia	UNCLOS	Tidak	Tidak	Tidak mungkin
Malaysia	UNCLOS	3 pulau	3 pulau	UNCLOS
Philipina	Sebagian	3 pulau	Tidak	Tidak mungkin
Taiwan	Semua	Semua	Semua	Tidak mungkin
Thailand	Tidak mungkin	Tidak mungkin	Tidak mungkin	UNCLOS
Vietnam	Semua	Semua	Semua	UNCLOS

Sumber: Energy Information Administration 2008,

Country analysis Brief South China Sea, hal.2

Vietnam adalah negara yang paling keras menentang klaim sepihak Tiongkok atas kepulauan Paracell dan Spratly. Hal ini bisa dilihat dari modernisasi militer Vietnam secara besar-besaran untuk mengimbangi militer Tiongkok. Sebut saja pembelian 6 Kapal Selam Kilo Class dari Rusia, rudal Yakhont versi Land Based, pembelian puluhan jet Tempur Sukhoi yang semuanya dari Rusia. Ini sudah menunjukkan sikap Vietnam yang menentang Tiongkok. Amerika Serikat yang mengetahui sikap Vietnam ini berusaha

<sup>28</sup> Amitav Acharya, , “*Seeking Security in Dragon’s Shadow: Tiongkok and Southeast Asia in The Emerging Asian Order*”, Working Paper No. 44, Singapore: Institute Defence and Security Studies, 2003, hal 5

untuk melakukan pendekatan dengan Vietnam untuk membendung pengaruh Tiongkok di ASEAN. Filipina adalah salah satu negara yang terlibat langsung dalam perselisihan ini, dan bisa dikatakan memiliki kekuatan militer yang sangat lemah sekali. Filipina sama sekali tidak memiliki kapabilitas untuk mempertahankan klaim mereka atas Kepulauan Spratly, karena militer yang sangat lemah. Padahal secara letak Geografis, Filipina adalah negara yang “*paling masuk akal*” sebagai pemilik kepulauan Spratly. Malaysia yang juga terlibat secara langsung dalam perselisihan ini, belum pernah secara langsung menunjukkan keberpihakan mereka ke Amerika Serikat atau Tiongkok.

## **B. Kepentingan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan**

Laut Tiongkok Selatan dianggap penting oleh beberapa negara karena: (1). Letak Strategis. Secara geografis Laut Tiongkok Selatan (LTS) dikelilingi sepuluh Negara pantai (RRT dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina). LTS menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati wilayah tersebut. (2). Potensi ekonomi dan pentingnya geopolitik termasuk kandungan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Indonesia mempunyai kepentingan politik, keamanan dan ekonomi yang signifikan yang dipertaruhkan apabila konflik itu muncul dan meningkat menjadi konflik bersenjata:

1. **Norma-norma dan peraturan global.** Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap penyelesaian damai atas sengketa Laut Tiongkok Selatan yang sesuai dengan hukum-hukum internasional.
2. **Aliansi Keamanan dan Stabilitas regional.** Sampai saat ini Indonesia belum sampai kepada keperluan untuk membentuk Pakta Pertahanan bersama antar anggota Asean karena dikhawatirkan seolah-olah akan berhadapan langsung dengan Tiongkok.
3. **Kepentingan ekonomi.** Setiap tahun, nilai perdagangan melintasi Laut Tiongkok Selatan senilai US\$ 5,3 triliun. Indonesia sendiri mempunyai pangsa pasar yang relatif besar mengingat ekspor impor ke Tiongkok dan Jepang semuanya melalui Laut Tiongkok Selatan. Belum lagi eksplorasi minyak dan gas dilaut Natuna.
4. **Hubungan ko-operatif dengan Tiongkok.** Pertaruhan dan implikasi memburuknya hubungan Amerika-Tiongkok dan Tiongkok-dengan Negara-negara Asean dalam klaim tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan sangat merugikan Indonesia.

## **D. Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan**

Indonesia sebagai negara penengah yang ditunjuk untuk menangani konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan juga memiliki latar belakang tersendiri. Keterlibatan Indonesia bukan tanpa alasan yang sifatnya strategis. Indonesia diharuskan untuk turut terlibat demi mencapai kepentingan ekonomi nasional.

### **D.1. Era Presiden Soeharto**

Era Orde Baru, Presiden Soeharto mampu menjadi penjaga harmoni dari politik realisme di kawasan. Ada pengakuan eksplisit dari negara-negara anggota ASEAN bahwa Indonesia yang terpersonifikasi dalam diri Pak Harto dihormati sebagai “saudara tua”. Bagi para realis, seperti Pak Harto, Perdana Menteri Malaysia (1981-2003) Mahathir Mohamad, dan Perdana Menteri Singapura (1959-1990) Lee Kuan Yew, negara-negara Asia Tenggara yang sebetulnya beraneka ragam secara politik harus bersatu mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan. Harmoni para realis ini terbukti mampu meredam potensi konflik yang mungkin timbul dari persoalan perbatasan, terutama di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Sayangnya, bandul realisme politik di Asia Tenggara sedikit demi sedikit bergeser sepinggal para pemimpin senior mereka. Struktur politik di negara-negara ASEAN makin terdesentralisasi seiring iklim politik yang semakin terbuka.

Bagi Presiden Soeharto masalah dalam negeri suatu negara hanya dapat diselesaikan oleh negara itu sendiri sesuai dengan politik luar negeri Indonesia “Bebas Aktif” dimana bersifat “non interference” (tidak campur tangan) bukan berarti “non involvement” (tidak ikut serta). senioritas mantan presiden Indonesia tersebut merupakan faktor yang membuat Indonesia dihormati di wilayah Asia Tenggara.

Terkait kemelut di Asia Tenggara dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, Indonesia giat “urun rembug” dalam mengatasi konflik tersebut dengan mensponsori Workshop tahunan tentang masalah tersebut sejak tahun 1990-an.

Perundingan-perundingan diadakan untuk mencari jalan keluar dengan Indonesia yang memainkan peran menonjol.<sup>29</sup>

## **D.2. Era Presiden Habibie**

Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan, pada masa Presiden Habibie Indonesia tidak terlalu banyak berperan. Dalam konteks konflik LTS, peran Indonesia tidak terlalu menonjol setelah lengsernya Soeharto. ASEAN Regional Forum (ARF) yang selalu dipakai Soeharto dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di kawasan sekitarnya. Konflik Philipina – Tiongkok adalah salah satu persoalan yang memperkuat asumsi tentang kelemahan ARF dalam menemukan jalan keluar atas konflik yang berkembang di kawasan ASEAN. Misalnya, segera sesudah ARF terbentuk sebuah insiden malah terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Awal tahun 1995 seorang nelayan Philipina menyatakan melihat sebuah bangunan yang dilengkapi alat komunikasi yang didirikan di Mischief Reef yang jauh memasuki kawasan yang telah diklaim Philipina.

Insiden ini mendorong pemerintah Philipina untuk membicarakan agresifitas Tiongkok dalam forum ARF. Meskipun demikian sampai tahun 1998 tak ada sinyal bahwa ARF akan mengambil keputusan efektif untuk menghentikan langkah-langkah Tiongkok yang dianggap Philipina telah mengancam keamanannya nasionalnya. Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tahun 1995 dan 1996 hanya mengingatkan anggota ARF agar menahan diri dan mengutamakan jalan damai sesuai dengan Deklarasi ASEAN tentang Laut Tiongkok Selatan (DoC) tahun 1992.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia pada bulan yang sama ke Tiongkok untuk menandatangani kerjasama bilateral tentang penerapan cara-cara damai dalam penyelesaian ketegangan memperkuat dugaan Philipina tentang adanya koalisi kedua negara yang merugikan pemerintah Philipina.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Tentang peran Indonesia, lihat Hasyim Djalal, *Preventif Diplomacy in Southeast Asia: Lesson learned*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, bab 8, hal 45

<sup>30</sup> Collective Defence Treaty terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, dan Philipina. Aliansi militer ini sering juga disebut juga pakta Manila.

### **D.3. Era Presiden Gus Dur**

Tahun 1999- 2001, terjadi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan yaitu antara:(1).Tahun 1999 Tiongkok - Filipina : Kapal perang Tiongkok dituduh melecehkan angkatan laut Filipina dekat kepulauan Spratly. (2)Tahun 1999 Filipina- Vietnam : Bulan Oktober tentara Vietnam menembaki pesawat angkatan udara Filipina dalam patrolinya di Spratly. (3)Tahun 1999 Malaysia-Filipina: Bulan Oktober sumber pertahanan Filipina melaporkan 2 pesawat tempur Malaysia dan dua pesawat Filipina mengintai di Spratly. (4)Tahun 2000 Tiongkok - Filipina: Bulan Mei pasukan Filipina adu tembak dengan nelayan Cina 1 meninggal, 7 ditahan. (5)Tahun 2001 Tiongkok-Filipina: Selama 3 bulan pertama, angkatan laut Filipina mengusir 14 kapal berbendera Tiongkok dari Spratly.. (6)Tahun 2001 Tiongkok-Filipina : Filipina mengirimkan perahu bersenjata ke laut dangkal Scarborough untuk membatasi Tiongkok meningkatkan struktur bebatuan.

Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan saat dimana Tiongkok mendapat kedudukan istimewa dalam politik luar negeri Indonesia, selain itu laju peningkatan hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok berkembang pesat. Gus Dur mengusulkan pembentukan poros Jakarta-Beijing-New Delhi menunjukkan pandangannya akan nilai strategis Tiongkok dalam mandala diplomasi Indonesia. Terkait konflik Laut Tiongkok Selatan, pemerintah Indonesia di masa Gus Dur, tidak terlalu aktif dalam upaya penyelesaian konflik, tetapi menguatkan organisasi ASEAN melalui beberapa pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN, mengingat pada tahun 2000-an terjadi sengketa antara negara yang mengklaim memiliki kepulauan di Laut Tiongkok Selatan. Gus Dur tidak terlalu melihat konflik ini karena fokus Gus Dur adalah melakukan pendekatan ke beberapa negara dengan mengadakan lawatan keluar negeri.

### **D.4. Era Presiden Megawati**

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok terus berkembang dengan ditandatanganinya MoU untuk pembentukan forum energi kedua negara pada Maret 2002. Melalui kerjasama tersebut menjadi payung investasi Tiongkok di Indonesia dalam bidang energi<sup>31</sup> Partisipasi aktif

---

<sup>31</sup>Christin, Sinaga. 2010. Memaknai Tahun Persahabatan

Indonesia dalam berbagai persoalan-persoalan global dan regional mendapatkan berbagai apresiasi baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu bukti nyata keberhasilan Indonesia adalah dengan terciptanya *Declaration on The Conduct of The Parties in the South Tiongkok Sea* pada tahun 2002.

Negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok menandatangani dokumen DOC pada November 2002 di Kamboja setelah melalui negosiasi berkepanjangan yang memakan waktu beberapa tahun.<sup>32</sup> Di dalam pandangan banyak analis, dokumen DOC pada dasarnya tidak lebih dari satu bentuk kompromi di antara dua posisi: tidak melakukan apapun atau membentuk perjanjian resmi yang mengikat secara hukum. Isi dari dokumen DOC dengan jelas menyebutkan tiga tujuan: mempromosikan upaya-upaya untuk membangun rasa saling percaya di antara para pihak, melibatkan diri di dalam kerjasama maritim, dan menyediakan dasar diskusi dan penyusunan suatu dokumen COC yang formal dan dengan kekuatan hukum yang mengikat.

#### **D.5. Era Presiden SBY**

Pada bulan Desember 2004, pertemuan SOM (*Senior Official's Meeting*) tentang DOC yang pertama diadakan di Kuala Lumpur, dan dalam pertemuan tersebut mereka memutuskan untuk membentuk grup kerjasama guna membahas pelaksanaan DOC. Mereka juga menyusun sebuah dokumen yang menjelaskan susunan, fungsi dan tanggung jawab dari grup kerjasama tersebut. Grup kerjasama tersebut bertugas untuk mempelajari dan menyediakan gagasan berkaitan dengan kebijakan pengimplementasian DOC, juga untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mungkin dapat menyebabkan konflik Laut Tiongkok Selatan bertambah parah.

Sejak akhir 2011 sampai pertengahan 2012, pejabat-pejabat senior ASEAN bekerja dalam menyusun kerangka sebuah dokumen yang menggambarkan garis-garis besar bagi dokumen COC. Karena negara-negara ASEAN melakukan hal tersebut tanpa partisipasi langsung dari Tiongkok, Tiongkok merasa tidak senang, tetapi tidak memprotes secara

---

Indonesia-Tiongkok. [www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politikinternasional/324](http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politikinternasional/324) memaknai-tahun-persahabatanindonesia-Tiongkok. Diakses 13 April 2015, pukul 20.00 Wib

<sup>32</sup><http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-Tiongkok-selatan-dari-doc-ke-coc/>, diakses 20 Nopember 2015, pukul 15.00 Wib

langsung wujud nyata dari solidaritas ASEAN tersebut. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh pada Juli 2012, ketika ASEAN mengajukan kepada Tiongkok dokumen yang mengandung unsur-unsur utama dokumen COC itu, Tiongkok masih menunjukkan niat untuk bekerjasama dengan ASEAN dalam proses penyusunan COC.

“Doktrin Natalegawa” (*Dynamic Equilibrium*) atau keseimbangan. doktrin tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan dikembangkan suatu tatanan internasional yang baru yang bersifat *win-win* dan bukan *zero-sum*. Perspektif *dynamic equilibrium* memiliki dua termin penting. *Dynamic* merujuk pada dinamisme politik global. Dengan doktrin tersebut, maka persoalan-persoalan politik dan keamanan global yang dihadapi oleh Indonesia akan dihadapi dengan tujuan keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama dengan mekanisme kerjasama.

Indonesia sebagai negara penengah yang ditunjuk untuk menangani konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan juga memiliki latar belakang tersendiri. Keterlibatan Indonesia bukan tanpa alasan yang sifatnya strategis. Indonesia diharuskan untuk turut terlibat demi mencapai kepentingan ekonomi nasional. Lebih lanjut, apabila kawasan di Laut Tiongkok Selatan dapat kembali tertib dan bebas dari segala ancaman, maka aktivitas perdagangan dan eksplorasi alam Indonesia di kawasan ini pun dapat berjalan lancar.

Oleh karena itu, peran Indonesia ditunjukkan melalui sejumlah perundingan yang dibentuk diantara negara-negara yang bertikai. Salah satu wujud upaya Indonesia adalah dengan melaksanakan *South Tiongkok Sea Informal Meetings* yang diadakan hampir setiap tahun. Signifikansi pertemuan ini menghasikan sebuah kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara yang bertikai untuk mendirikan sebuah wilayah politik guna melancarkan hubungan diplomatik dan kerjasama satu sama lain. Selain itu, usaha untuk meningkatkan *confidence building measures* menjadi bagian penting disetiap agenda pertemuan. Selain *South Tiongkok Sea Informal Meetings*, upaya Indonesia juga diwujudkan dalam sejumlah perundingan damai lainnya, seperti *Technical Working Groups* (TWGs), *Groups of Experts* (GEs) dan *Study Groups* (SGs).

#### **D.6. Era Presiden Jokowi**

Pandangan Jokowi terhadap Laut Tiongkok Selatan, bahwa Indonesia tidak perlu terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan jika manfaat yang didapat dari keikutsertaan tersebut tidak ada. Pada dasarnya sebagai negara terbesar di ASEAN dan paling netral menanggapi kasus ini, peran Indonesia menjadi dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Pernyataan Jokowi menjadi sangat mengejutkan karena ASEAN sendiri telah mengupayakan *Declaration of Conduct* (DoC) dan kemudian *Code of Conduct* (CoC) untuk menekan tensi konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Meski demikian, eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan saat ini memang semakin tinggi. Tensi ketegangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan meningkat. Ketegangan ini sudah terjadi sejak lama dan bersifat pasang surut. Ketegangan di kawasan ini kembali meningkat sejak awal Mei 2014. Peningkatan eskalasi ini dipicu pembangunan kilang minyak Tiongkok His Yang Shi You 981 di wilayah yang dianggap masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental Vietnam.<sup>33</sup>

Berbicara ASEAN, negara anggotanya sendiri memiliki sikap yang berbeda-beda dalam memandang konflik Laut Tiongkok Selatan. Filipina dan Vietnam telah secara terang-terangan menunjukkan ketegasan mereka untuk tidak akan menyerahkan wilayah yang disengketakan. Malaysia dan Brunei Darusalam sebagai *claimant states* lainnya tidak menunjukkan sikap apapun karena kepentingan nasional mereka dan wilayah yang disengketakan belum pernah mengalami benturan langsung dengan Tiongkok. Kemudian sikap Laos dan Myanmar justru berpihak kepada Tiongkok karena aktifitas ekonomi mereka sangat bergantung pada Tiongkok. Sedangkan Singapura dan Thailand masih mengamati untung rugi dari keterlibatannya dalam konflik ini.

#### **E. KESIMPULAN**

Indonesia telah berhasil mendorong kesepakatan *Guidelines* dari DoC Laut Tiongkok Selatan, setelah 6 (enam) tahun perundingan tanpa kemajuan. Namun sepanjang inti permasalahannya belum terselesaikan, maka negara-negara di kawasan tetap

---

<sup>33</sup><http://nasional.sindonews.com/read/1055705/19/indonesia-di-pusaran-konflik-laut-Tiongkok-selatan-1445604047>, diakses 20 Nopember 2015, pukul 04.00 Wib

terbayang-bayangi oleh potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan. Karena itu Indonesia tidak berdiam diri ketika eskalasi ketegangan berpotensi memecah belah ASEAN. Indonesia mengkonsolidasikan kembali kesamaan dan kesatuan pandang negara ASEAN terhadap 6 (enam) prinsip dasar ASEAN yang diidentifikasi Indonesia terhadap isu Laut Tiongkok Selatan. Bagaimanapun kesatuan pandang dan sentralitas ASEAN dalam memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan merupakan sebuah keharusan.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inisiatif dan prakarsa Indonesia yang menghasilkan “*Bali Principles*”. Sebuah prinsip yang mengatur norma dasar perilaku dan hubungan antar negara di kawasan Asia dan Pasifik yang senantiasa mengedepankan cara-cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman penggunaan kekerasan. Menyikapi berbagai potensi konflik yang menyangkut isu maritim, Indonesia menggagas sebuah pendekatan baru terhadap isu kelautan yang lebih positif dan komprehensif dengan menekankan kerja sama kelautan antara negara (*maritime cooperation*). Indonesia menggagas ASEAN Maritime Forum yang merupakan arsitektur penting masalah kelautan di kawasan, dan selanjutnya disempurnakan melalui Expanded ASEAN Maritime Forum. Upaya Indonesia untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak semata-mata bersifat reaktif, melainkan mencakup upaya-upaya memperkuat kapasitas kawasan untuk mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik. Untuk itu Indonesia memprakarsai *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amer, Ramses. “Claims and Conflict Situations” in Timo Kivimaki, (ed), *War or Peace in The South China Sea?*, NIAS Press, Copenhagen, 2002

Bedjaoui, M, *the fundamental preventif diplomacy*, Routledge and the center international health and cooperation, New York, 2000

Buzan, Barry, *Regions and Power: The Structure of International Security*, Cambridge University Press, New York, 2003

Constantinou, C. M., *On the Way to Diplomacy*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996

Djelantik, Sukawarsini, *Diplomasi antara Teori dan Praktik.*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008

Department of Policy Planning, Ministry of Foreign Affairs, People's Republic of China. *China's Foreign Affairs, 2003 Edition*, World Affairs Press, Beijing, 2003

Emmers, Ralf, *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*, RoutledgeCurzon, London and New York, 2003

Martin, Griffiths, Terry O'Callaghan, Steven C. Roach, *International Relation: The Key Concepts*, Key Guides, Routledge, 2002.

Roy, S L, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta 1991

Snow, Donald M. dan Eugene Brown, *International Relations: the changing contours of power*, Palgrave, Macmillian, 2010

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yudistira, Jakarta, 2000

To, Lee Lai, *China and the South China Sea Dialogues*, Praeger, London, 1999 .

Watson, A, *Diplomacy: The Dialogue Between States*, Eyre Methuen, London, 1982,

**Jurnal/Makalah/Buletin**

- Acharya, Amitav , , “*Seeking Security in Dragon’s Shadow: Tiongkok and Southeast Asia in The Emerging Asian Order*”, Working Paper No. 44, Singapore: *Institute Defence and Security Studies*, 2003
- Bercovitch, Jacob and Jackson, Richard. (2001). “Negotiation or Mediation?: An Exploration of Factors Affecting the Choice of Conflict Management in International Conflict”, *Negotiation Journal*; Vol. 17, No. 1.
- Djalal,Hasjim “*Potential Conflict in the South Tiongkok Sea: In search of Coopertation*,”*Indonesian Quarterly* XVIII, no.2 (Second Quarter,1990)
- Kaplan, Robert D. , “*The South Tiongkok Sea is The future of Conflict*”, dalam *Foreign Policy* September/Oktober 2011
- Kurniawan, Yudha , "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan, *Paper* ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung, 2011.
- Rowan, J.P. *The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South Tiongkok Sea Dispute*. *Asian Survey*, Vol XLV, No. 3, May/June 2005.
- Schofield, Clive , “*An Arms Race in South Tiongkok Sea?*”. *IBRU Boundary and Security Bulletin* July 1994

### **Internet**

- Chin, Yoon Chin. (2003). *Potential for Conflict in The Spratly Islands*,  
<http://www.ccc.nps.navy.mil/research/theses/Chin03.pdf>, diakses tanggal 20  
 Nopember 2015
- “Sengketa Wilayah Laut Tiongkok Selatan” diakses dari  
[http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/aayear-end-story\\_The\\_Spratly  
 Islands\\_Dispute\\_in\\_the\\_South\\_Tiongkok\\_Sea:\\_Problems,\\_Policies,\\_and\\_Prospects\\_for  
 Diplomatic\\_Accommodation](http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/aayear-end-story_The_Spratly_Islands_Dispute_in_the_South_Tiongkok_Sea:_Problems,_Policies,_and_Prospects_for_Diplomatic_Accommodation)” diakses dari [www.southTiongkoksea.org](http://www.southTiongkoksea.org)
- Eduardus mengutip dari “*The South Tiongkok Sea Dispute: Prospects for Preventive Diplomacy*”. Diunduh dari  
[http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South\\_Tiongkok\\_Sea1.html](http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South_Tiongkok_Sea1.html).

Fathurrahmi, Farah. “Pejabat PBB Menekankan Nilai Diplomasi Preventif dalam Penyelesaian Konflik”. Diakses melalui <http://www.unic-jakarta.org>

“Jepang-Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan” *The Japan Foundation*.  
 diunduh dari  
<http://www.jpfi.or.id/artikel/studi-jepang-pertukaran-intelektual/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-tiongkok-selatan>.

“Sengketa Kepulauan Spratly: Tantangan Bagi Indonesia” (Tiongkok Oupst,2011).  
 Diunduh dari  
<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik-internasional/472-sengketa-kepulauan-spratly-tantangan-bagi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011>.  
<http://news.liputan6.com/read/2030094/siaga-konflik-laut-tiongkok-selatan-tni-perkuat-pulau-terluar>, diakses pada tanggal 20 September 2014, jam 08.00 Wib  
<http://politik.kompasiana.com/2014/06/23/jokowi-tidak-memahami-pentingnya-laut-tiongkok-selatan-bagi-indonesia--663764.html>  
<http://kemlu.go.id>  
<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/180-diplomasi-november-2012/1549-diplomasi-ri-mengelola-konflik-laut-tiongkok-selatan.html>

“The Spratly Islands Dispute in the South Tiongkok Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation”. <http://www.southTiongkoksea.org/docs/Joyner,%20Spratly%20Islands%20Dispute.pdf>.

“The South Tiongkok Sea Dispute: Prospects for Preventive Diplomacy”. Diunduh dari  
[http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South\\_Tiongkok\\_Sea1.html](http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South_Tiongkok_Sea1.html).  
<http://saripedia.wordpress.com/tag/sengketa-laut-tiongkok-selatan/>,  
<http://politikindonesia.com/index.php?k=politisiana&i=58019-Indonesia-Punya-Kepentingan-di-Laut-Tiongkok-Selatan>,





